



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALI MAHFUD**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **87490**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	795.000.000
1. Tanah Seluas 408 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI	Rp.	
45.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 408 m2/120 m2 di BOYOLALI, WARISAN	Rp.	
150.000.000		
3. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI	Rp.	
300.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/140 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI	Rp.	
300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	130.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TX ADVENTURE JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
110.000.000		
2. MOTOR, HONDA LEGENDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI	Rp.	
1.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MIO JT Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA AEROK Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	932.800.000



III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	932.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.